

## KETEPATAN ANGGARAN: MENGURAI EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ANGGARAN PENGAWASAN WILAYAH MARITIM SULAWESI TENGAH

Satriani<sup>1\*</sup>, Nina Yusnita Yamin<sup>2</sup>, Selmita Paranoan<sup>3</sup>,  
Andi Ainil Mufidah Tanra<sup>4</sup>,  
Latifah Sukmawati Yuniar<sup>5</sup>

Program Studi Akuntansi<sup>1, 2, 3, 4, 5</sup>  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis<sup>1, 2, 3, 4, 5</sup>  
Universitas Tadulako<sup>1, 2, 3, 4, 5</sup>

[Satrianis6446@gmail.com](mailto:Satrianis6446@gmail.com)<sup>1</sup>, [nyusnita.untad@gmail.com](mailto:nyusnita.untad@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[shelo0709@yahoo.co.id](mailto:shelo0709@yahoo.co.id)<sup>3</sup>, [ainilmufidah.febuntad@gmail.com](mailto:ainilmufidah.febuntad@gmail.com)<sup>4</sup>,  
[latifahsukmawati@untad.ac.id](mailto:latifahsukmawati@untad.ac.id)<sup>5</sup>

**Received:** June 2, 2025. **Revised:** June 13, 2025. **Accepted:** June 15, 2025 . **Issue Period:** Vol.9 No.3 (2025), Pp. 1227-1234

**Abstrak:** Pengelolaan dana pengawasan maritim dari kelompok masyarakat pengawas memegang peran krusial dalam menjalankan fungsi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan secara efektif. Penelitian dilakukan untuk memperoleh analisis atas efektivitas pengelolaan dana dalam pelaksanaan pengawasan wilayah maritim Sulawesi Tengah. Penelitian mengeksplorasi secara deskriptif kualitatif untuk menemukan luaran yang menggambarkan perhitungan efektivitas dan hambatan yang timbul dalam pengelolaannya. Temuan penelitian menunjukkan efektivitas pengelolaan dana pada kelompok masyarakat pengawas pada tahun 2022 hingga 2024, dengan nilai efektivitas mencapai 100% yang menggambarkan realisasi dana yang diterima selaras dengan jumlah dana yang dianggarkan sehingga mencerminkan kesesuaian antara anggaran dan sasaran yang direncanakan. Disamping itu, keterbatasan dana, letak geografis yang luas hingga jumlah kelompok yang banyak menjadi hambatan dalam peningkatan pencapaian pembinaan yang diprogramkan. Penelitian berimplikasi pada aktivitas masyarakat dalam pengelolaan dana pengawasan maritim dari kelompok masyarakat pengawas untuk dapat mengadakan suatu strategi yang lebih baik dalam pengelolaan dana, peningkatan infrastruktur serta pendekatan yang lebih terintegrasi dalam pembinaan kelompok.

**Kata kunci:** Efektivitas, Kelompok Masyarakat Pengawas, Masyarakat Maritim, Organisasi Publik, Pengelolaan Anggaran

**Abstract:** This shows that the efficiency of regional expenditure is still a challenge. Fluctuations in efficiency ratios indicate that local governments have not consistently been able to control expenditure in proportion to the revenue earned. Expenditures that exceed revenues in certain years indicate the need for improvement in budget planning and supervision. This is consistent with the opinion of Mardiasmo (2018) which states that the efficiency of regional spending is an important indicator in measuring the financial accountability of local governments. Research by Lubis and Sari (2020) also found that many regions with high revenues are still unable to manage expenditure efficiently due to weak budget control and lack of prioritization in productive expenditure. Overall, the findings of this study indicate that the Morowali Regency Government has shown progress in several aspects of financial



DOI: 10.52362/jisamar.v9i3.1992

Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

*management, especially in improving PAD performance as reflected through the effectiveness ratio. However, fiscal independence still needs to be improved through diversification of PAD sources, improving public services, and fostering local potential. Expenditure efficiency is also still a challenge that must be overcome by more careful planning and strict budget supervision. This research supports the results of a study by Yuliana & Ramdani (2023) which states that regions with high PAD are not necessarily efficient if not supported by management.*

**Keywords:** Budget Management, Supervisory Community Group, Effectiveness, Maritime Society, Public Organization

## I. PENDAHULUAN

Ancaman serius yang dihadapi negara kepulauan layaknya Indonesia terhadap ekosistem lautnya dan keberlanjutan sumber daya perikanan menjadi permasalahan yang perlu diperhatikan secara khusus [1], [2]. Fenomena penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (IUU fishing) menyebabkan kerugian ekonomi signifikan, diperkirakan mencapai lebih dari Rp 13 triliun antara tahun 2020 hingga 2025, dengan estimasi 7,5 juta ton ikan ditangkap secara ilegal setiap tahunnya [3]. Selain itu, perusakan ekosistem laut, seperti terumbu karang di Pantai Kilo Lima Kabupaten Banggai dan Teluk Palu, semakin memprihatinkan akibat perubahan iklim, polusi, dan praktik penangkapan ikan yang merusak [4]. Dampak dari kerusakan ini sangat luas, mencakup keruntuhan industri perikanan dan pariwisata, peningkatan kerusakan pesisir, penurunan ketersediaan oksigen, serta masalah kesehatan masyarakat akibat kontaminasi mikroplastik. Ketidakpastian dalam pengelolaan wilayah maritim ini diperparah oleh persoalan tata kelola seperti dualisme hukum dan ketidaksinkronan rencana tata ruang.

Pemerintah Indonesia memiliki visi strategis untuk menjadi poros maritim dunia dan berkomitmen pada konsep ekonomi biru untuk memanfaatkan potensi sumber daya laut secara berkelanjutan. Berbagai program prioritas telah dicanangkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), termasuk kebijakan penangkapan terukur berbasis kuota dan pengembangan perikanan budidaya. Namun, implementasi visi ini dihadapkan pada tantangan anggaran yang signifikan. Anggaran KKP untuk Tahun Anggaran 2025 mengalami pemangkasan substansial dari pagu awal Rp 6,22 triliun menjadi Rp 4,10 triliun. Bahkan, sekitar 70% dari anggaran konservasi KKP dialokasikan untuk gaji pegawai, menyisakan dana minimal untuk kegiatan konservasi aktual di lapangan [5]. Pemangkasan ini berpotensi menghambat Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) dalam menjalankan tugas pengawasan dan pencegahan IUU fishing secara efektif, terutama karena keterbatasan dana operasional seperti bahan bakar untuk patrol [6]. Kondisi ini juga berisiko meningkatkan angka kemiskinan nelayan di Indonesia.

Riset terdahulu mengenai alokasi anggaran pemerintah pusat untuk konservasi maritim menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah menetapkan target ambisius untuk Kawasan Konservasi Perairan (KKP) seluas 23,4 juta hektar pada tahun 2020, dua pertiga dari KKP yang ada masih berada dalam tahap inisiasi atau "peringkat Merah". Hal ini disebabkan oleh keterbatasan kapasitas sumber daya keuangan dan manusia [7]. Studi kasus juga menemukan bahwa elemen-elemen seperti konteks, perencanaan, proses, dan output pengelolaan KKP dinilai "kurang efektif," meskipun elemen input (ketersediaan dana) dan outcome (hasil akhir) dinilai "efektif". Ini mengindikasikan bahwa meskipun dana mungkin dialokasikan, proses operasional dan implementasi di lapangan masih menghadapi masalah mendasar [8]. Penelitian juga menyoroti pentingnya sinkronisasi antara perencanaan pembangunan lingkungan hidup di tingkat pusat dan daerah untuk mencegah tumpang tindih kebijakan dan inefisiensi.

Penelitian ini menghadirkan kebaruan dengan memfokuskan pada aktivitas pengelolaan anggaran oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sulawesi Tengah. Wilayah Laut Sulawesi menghadapi masalah IUU fishing yang signifikan, dengan kerugian finansial diperkirakan mencapai sepertiga dari total nilai perikanan laut tahunan di wilayah tersebut. DKP Sulawesi Tengah, meskipun memiliki kapal patroli yang memadai seperti Todak 01, seringkali tidak efektif dalam operasi pengawasan karena ketersediaan bahan bakar yang tidak memadai dan kondisi cuaca buruk. Akibatnya, pelanggaran seperti ketidakpatuhan administrasi, pelanggaran jalur penangkapan, dan penggunaan alat tangkap terlarang masih marak. Meskipun Laporan Keuangan DKP Sulawesi Tengah Tahun 2023 menunjukkan komitmen terhadap pengelolaan keuangan yang profesional dan



akuntabel berdasarkan standar akuntansi berbasis akrual, adanya kendala operasional ini menyoroiti kesenjangan antara kepatuhan formal akuntansi dan efektivitas operasional yang sebenarnya.

Tujuan utama penelitian ini adalah menganalisis ketepatan anggaran dalam konteks pengelolaan anggaran pengawasan wilayah maritim, dengan fokus pada DKP Sulawesi Tengah, untuk mengidentifikasi sejauh mana anggaran dapat secara efektif mendukung upaya pengawasan dan perlindungan maritim. Kontribusi penelitian ini sangat signifikan dalam pengembangan dunia akuntansi, khususnya bidang Blue Accounting.

Blue Accounting adalah pendekatan inovatif yang mengintegrasikan prinsip-prinsip akuntansi dengan pengelolaan sumber daya laut dan pesisir untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), terutama SDG 14 tentang Kehidupan Bawah Air. Secara eksplisit dan implisit, penelitian ini akan memperkaya pemahaman tentang hubungan antara sektor perikanan dan keberlanjutan laut [9], [10]. Blue Accounting mampu mengukur "laba" yang lebih komprehensif untuk kegiatan perikanan, mencakup nilai-nilai sosial seperti kesejahteraan nelayan dan nilai-nilai lingkungan seperti keberlanjutan laut. Informasi yang dihasilkan dari Blue Accounting juga dapat menjadi dasar yang kuat untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam mendukung keberlanjutan laut dan industri perikanan.

Dalam konteks akuntansi manajemen sektor publik, penelitian ini memperkuat peran akuntansi manajemen dalam perencanaan dan pengendalian anggaran, penyediaan informasi biaya, dan penilaian kinerja. Blue Accounting mengisi celah akuntansi manajemen tradisional yang seringkali belum sepenuhnya menangkap dampak lingkungan dan sosial dari pengeluaran public [11]. Dengan mengintegrasikan informasi finansial dan non-finansial, Blue Accounting memberikan gambaran "keuntungan komprehensif" yang mendorong pergeseran paradigma dalam pengukuran kinerja sektor publik maritim, dari sekadar kepatuhan finansial menjadi pengukuran dampak yang lebih luas dan holistik.

## II. METODE DAN MATERI

### METODE

Dalam mengeksplorasi pengelolaan anggaran pada kelompok masyarakat pengawas penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memperoleh analisis atas efektivitas dan hambatan dalam pelaksanaan program pembinaan di Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Tengah, melalui dokumen laporan realisasi organisasi, rincian kertas kerja, data kegiatan PokMasWas, dan dokumen pendukung lainnya serta wawancara kepada pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pengelolaan dana kelompok masyarakat pengawas, termasuk masyarakat dan pengawas yang ada. Teknik analisis data menerapkan triangulasi metode untuk memperoleh gambaran umum atas efektivitas pengelolaan dana pada kelompok masyarakat pengawas.

### MATERI

#### Efektivitas dan Ukurannya

Efektivitas merupakan relasi antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output pada pencapaian tujuan, berarti semakin efektif aktivitas, program, ataupun organisasi seperti yang di uraikan oleh Mahmudi (2019;86). Oleh karenanya, agar dapat meninjau pencapaian efektifitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja dimanfaatkan rumus Rasio Efektivitas, Mahmudi [12]:

$$\text{Efektivitas} = \text{Anggaran} \div \text{Realisasi} \times 100\%$$

Tabel I. Kategori Penilaian Efektifitas

<i>Kemampuan Keuangan</i>	<i>Rasio Efektivitas</i>
Sangat Efektif	100%
Efektif	90-100%
Cukup Efektif	80-90%
Kurang Efektif	60-80%



Efektif	
Tidak Efektif	<60%

### Fungsi dan Manajemen Pengelolaan

Bertujuan dalam mengetahui pencapaian kesuksesan pemerintah dalam upaya pencapaian tujuan anggaran. Pengelolaan keuangan kelompok masyarakat, yang menjadi wewenang pemerintah dalam melakukan pengelolaan, dan juga lembaga serta masyarakat yang turut adil dalam memantau pelaksanaan aktivitas tujuan, visi, serta misi organisasi. Pemerintah wajib membuat keterangan pelaporan keuangan yang dimanfaatkan dalam menetapkan pengambilan keputusan.

### III. PEMBAHASAN DAN HASIL

#### Input Dan Outcome Dalam Pengelolaan Dana Kelompok Masyarakat Pengawas

Sumber dana Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) berasal dari berbagai sumber yang mendukung pelaksanaan tugas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Dana tersebut berasal dari alokasi dana dekonsentrasi pemerintah pusat dengan perantara Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang digunakan untuk pembinaan, pelatihan, dan operasional Pokmaswas. Selain itu, dana juga dapat diperoleh dari pemerintah daerah yang berlangsung di kabupaten maupun provinsi, yang menyediakan dukungan dalam bentuk hibah atau bantuan operasional.

Pokmaswas diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang menjamin pelibatan dan perlindungan hukum bagi Pokmaswas sebagai kelompok masyarakat pengawas sumber daya kelautan dan perikanan. UU No. 31 Tahun 2004 Pasal 67 mengamanatkan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, sementara PermenKP No. 40 Tahun 2014 [13] mengatur peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau kecil, termasuk mekanisme pembentukan, pembinaan, dan pelaporan Pokmaswas. Penyaluran dana dan bantuan operasional Pokmaswas diatur oleh Direktorat Jenderal

Kegiatan pengawasan biasanya dijadwalkan secara rutin, misalnya dua hingga empat kali dalam sebulan, tergantung pada kebutuhan dan kondisi wilayah pengawasan. Jadwal ini harus dipatuhi agar pengawasan dapat berjalan konsisten dan memberikan hasil yang maksimal dalam mendeteksi dan mencegah pelanggaran. Selain pengawasan rutin, waktu pelaksanaan juga mencakup kegiatan pembinaan, pelatihan, dan sosialisasi yang dilaksanakan secara berkala, misalnya setiap triwulan atau semester.

Dalam hal penganggaran, dana Pokmaswas difokuskan untuk memenuhi kebutuhan operasional seperti pembelian alat pengawasan, biaya transportasi, pelatihan anggota, serta kegiatan edukasi dan sosialisasi. Biasanya, penganggaran disusun berdasarkan kebutuhan kelompok dan disesuaikan dengan jumlah anggota serta cakupan wilayah pengawasan yang menjadi tanggung jawab

Pokmaswas biasanya terdiri dari sekitar 10 sampai 15 anggota yang dibagi ke dalam beberapa kelompok kecil sesuai dengan wilayah pengawasan. Setiap kelompok memiliki tugas khusus yang saling melengkapi, seperti pengawasan kapal perikanan, pengawasan pembudidayaan ikan, dan pengawasan pemanfaatan ruang laut. Jumlah anggota dan pembagian kelompok ini disesuaikan dengan luas wilayah dan tingkat aktivitas perikanan di daerah tersebut agar pengawasan dapat berjalan efektif dan menyeluruh.

Pendampingan kepada Pokmaswas merupakan salah satu output dalam pengelolaan dana yang bertujuan meningkatkan kapasitas dan efektivitas kelompok masyarakat pengawas dalam menjalankan tugasnya. Pendampingan ini biasanya dilakukan oleh aparat pemerintah daerah, seperti Dinas Kelautan dan Perikanan, yang memberikan bimbingan teknis, sosialisasi regulasi, serta dukungan administratif agar Pokmaswas dapat bekerja secara optimal. Melalui pendampingan, anggota Pokmaswas dibekali pemahaman tentang prosedur pengawasan, serta penguatan peran mereka sebagai mitra pemerintah guna melindungi kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan. Pendampingan yang berkelanjutan juga memperkuat sinergi antara Pokmaswas dan instansi terkait sehingga pengawasan dapat berjalan efektif dan responsif terhadap permasalahan di lapangan

Salah satu bentuk bantuan yang diberikan kepada Pokmaswas adalah kaos khusus yang menjadi seragam resmi kelompok. Kaos ini tidak hanya berfungsi sebagai identitas visual yang memperkuat rasa kebersamaan dan profesionalisme anggota, tetapi juga sebagai simbol pengakuan resmi dari pemerintah terhadap keberadaan dan peran Pokmaswas.



Bantuan berupa perahu yang sangat strategis dalam mendukung pengawasan Pokmaswas, terutama di wilayah pesisir dan perairan yang luas. Perahu ini memungkinkan anggota Pokmaswas untuk menjangkau area pengawasan yang lebih luas hingga 12 mil dari pantai, sehingga pengawasan terhadap aktivitas perikanan ilegal, penangkapan ikan yang merusak, dan pelanggaran lainnya dapat dilakukan secara lebih menyeluruh dan cepat.

#### Analisis Data

Merujuk data yang diperoleh peneliti agar dapat mengetahui taraf efektivitas pengelolaan dana kelompok Masyarakat pengawasa (POKMASWAS) dapat dilihat dengan data dibawah ini:

Tabel 2. Persentase Anggaran x Realisasi (Dok. Anggaran PSDKP) 2022

No	Alokasi	Anggaran	Realisasi	Persentase
1.	Konsumsi rapat rencana pembinaan POKMASWAS	600.000	600.000	100%
2.	Pembuatan kaos POKMASWAS	20.000.000	20.000.000	100%
3.	Komsumsi rapat kegiatan pembinaan POKMASWAS	2.400.000	2.400.000	100%
4.	Perjalanan dinas dalam rangka pembinaan POKMASWAS	36.750.000	36.750.000	100%
5.	Laporan semester	433.000	433.000	100%
6.	Konsumsi rapat konsolidasi	1.350.000	1.350.000	100%
7.	Perjalanan dinas dalam rangka konsolidasi	15.750.000	15.750.000	100%
Total		77.283.000		

Table 3. Persentase Anggaran x Realisasi (Dok. Anggaran PSDKP) 2023

No	Alokasi	Anggaran	Realisasi	Persentase
1.	Konsumsi rapat rencana pembinaan POKMASWAS	600.000	600.000	100%
2.	Pembuatan kaos POKMASWAS	20.000.000	20.000.000	100%
3.	Konsumsi rapat kegiatan pembinaan POKMASWAS	2.400.000	2.400.000	100%
4.	Perjalanan dinas dalam rangka pembinaan POKMASWAS	33.285.000	33.285.000	100%
5.	Laporan semester	430.000	430.000	100%
6.	Konsumsi rapat konsolidasi	1.350.000	1.350.000	100%
7.	Perjalanan dinas dalam rangka konsolidasi	14.265.000	14.265.000	100%
Total		72.330.000		

Tabel 4. Persentase Anggaran x Realisasi (Dok. Anggaran PSDKP) 2024

No	Alokasi	Anggaran	Realisasi	Persentase
1.	Konsumsi rapat rencana pembinaan POKMASWAS	924.000	924.000	100%
2.	Pembuatan kaos POKMASWAS	40.000.000	40.000.000	100%
3.	Konsumsi rapat kegiatan pembinaan POKMASWAS	6.600.000	6.600.000	100%
4.	Perjalanan dinas dalam rangka pembinaan POKMASWAS	21.560.000	21.560.000	100%
5.	Konsumsi rapat monitoring dan evaluasi	1.980.000	1.980.000	100%
6.	Laporan semester	636.000	636.000	100%
.	Perjalanan dinas dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembinaan	14.900.000	14.900.000	100%



POKMASWAS	
Total	86.600.000

Tabel 5. Jumlah Kelompok Tiap Tahun Yang Menjadi Target Yang Dibina

No	Tahun	Jumlah Target Kelompok Yang Ingin Dibina	Jumlah Kelompok Yang Berhasil Dibina
1.	2022	17 kelompok	15 kelompok
2.	2023	17 kelompok	13 kelompok
3.	2024	17 kelompok	17 kelompok

Analisis efektivitas pengelolaan dana kelompok Masyarakat pengawas (POKMASWAS) akan dilakukan dengan melakukan perbandingan antara dana yang direalisasikan dengan dana yang dianggarkan. Dari ketiga tabel perbandingan rencana anggaran serta realisasi penggunaan dana kelompok Masyarakat pengawas (POKMASWAS)

Perhitungan nilai efektivitas dilakukan dengan memanfaatkan teori value for money. Merujuk kriteria efektivitas teori value for money, nilai efektivitas penggunaan dana POKMASWAS tergolong dalam efektif, dengan perhitungan 100%. Kriteria efektif artinya jumlah dana yang di dapatkan sama dengan jumlah dana saat dianggarkan. dapat dilihat seluruh dana yang direalisasikan sama dengan jumlah saat dianggarkan. Artinya, realisasi dana POKMASWAS pada tahun 2022, 2023, dan 2024 sesuai dengan sasaran atau anggarannya.

Dari tabel jumlah kelompok yang menjadi target pembinaan di atas dapat dilihat bahwa pada rincian kertas kerja tiap tahun terdapat 17 kelompok Masyarakat yang menjadi target tiap tahunnya untuk dibina dalam membantu pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan,

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti kepada pihak pengelola dana yaitu bapak Rizal, jumlah kelompok yang mencapai target pembinaan hanya tercapai di tahun 2024 ada beberapa hambatan dalam Pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas):

1. Dana yang Tidak Mencukupi

Salah satu hambatan terbesar dalam pembinaan pokmaswas adalah keterbatasan dana. Banyak pokmaswas yang bergantung pada dana dari pemerintah untuk melaksanakan program-program mereka. Namun, seringkali dana yang diperoleh tidak cukup dalam memenuhi semua kebutuhan operasional serta kegiatan pengawasan. Keterbatasan dana ini dapat mengakibatkan banyak program yang direncanakan tidak dapat dilaksanakan karena tidak ada anggaran yang cukup. Misalnya, pelatihan untuk anggota pokmaswas, pengadaan alat pengawasan, dan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat menjadi terhambat.

2. Letak Geografis yang Luas

Letak geografis yang luas dan beragam menjadi tantangan tersendiri bagi pokmaswas. Indonesia, sebagai negara kepulauan, memiliki ribuan pulau dengan kondisi geografis yang berbeda-beda. Hambatan yang muncul akibat letak geografis dengan banyaknya pulau dan wilayah perairan yang harus diawasi, koordinasi antar anggota pokmaswas menjadi sulit. Jarak yang jauh antara satu kelompok dengan kelompok lainnya dapat menghambat komunikasi dan kolaborasi. dan beberapa daerah terpencil mungkin sulit dijangkau, baik dari segi transportasi maupun infrastruktur. Hal ini dapat mengakibatkan keterlambatan dalam pelaksanaan program dan pengawasan yang tidak optimal.

3. Jumlah Kelompok yang Banyak

Dengan banyaknya kelompok, pengelolaan dan pembinaan menjadi lebih kompleks. Setiap kelompok mungkin memiliki kebutuhan dan tantangan yang tidak sama, oleh karenanya membutuhkan pendekatan yang berbeda juga. Hal ini dapat menyulitkan pengurus dalam merencanakan dan melaksanakan program yang efektif.

#### IV. KESIMPULAN

Analisis efektivitas pengelolaan dana kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) menunjukkan bahwa penggunaan dana selama tahun 2022, 2023, dan 2024 tergolong efektif, dengan nilai efektivitas mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi dana yang diterima sama dengan jumlah yang dianggarkan, mencerminkan kesesuaian antara anggaran dan sasaran yang ditetapkan. Meskipun demikian, terdapat beberapa



hambatan yang mempengaruhi pencapaian target pembinaan kelompok, antara lain keterbatasan dana, letak geografis yang luas, dan jumlah kelompok yang banyak. Keterbatasan dana mengakibatkan beberapa program tidak dapat dilaksanakan, sedangkan letak geografis yang beragam menyulitkan koordinasi dan komunikasi antar kelompok. Selain itu, banyaknya kelompok yang harus dibina menambah kompleksitas dalam pengelolaan. Sehingga, agar dapat memberikan peningkatan terhadap efektivitas pengelolaan dana Pokmaswas, memerlukan adanya strategi yang lebih baik dalam pengelolaan dana, peningkatan infrastruktur, serta pendekatan yang lebih terintegrasi dalam pembinaan kelompok.

Berdasarkan hasil penelitian ini, sejumlah saran yang direkomendasikan:

1. Bagi pemerintah: Pemerintah perlu melakukan penyesuaian dan fleksibilitas dalam alokasi dana agar dapat mendukung program-program prioritas yang berdampak langsung pada peningkatan kapasitas Pokmaswas, terutama di daerah dengan kendala geografis yang berat.
2. Bagi anggota pokmaswas: Anggota Pokmaswas diharapkan lebih proaktif dalam mengikuti pembinaan dan pelatihan yang diselenggarakan, serta berinisiatif mengoptimalkan penggunaan bantuan dan sarana yang tersedia.
3. Bagi peneliti selanjutnya: Peneliti disarankan untuk melakukan kajian lebih mendalam mengenai pengaruh faktor geografis dan sosial budaya terhadap efektivitas pembinaan dan pengawasan Pokmaswas.

## REFERENSI

- [1] G. A. Petrossian, "Preventing illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing: A situational approach," *Biol. Conserv.*, vol. 189, pp. 39–48, 2015, doi: <https://doi.org/10.1016/j.biocon.2014.09.005>.
- [2] D. Liddick, "The dimensions of a transnational crime problem: the case of IUU fishing," *Trends Organ. crime*, vol. 17, pp. 290–312, 2014.
- [3] Globe, "Illegal fishing costs Indonesia over \$800 million in five years," APSN. [Online]. Available: <https://www.asia-pacific-solidarity.net/news/2025-06-06/illegal-fishing-costs-indonesia-over-800-million-five-years.html>
- [4] Y. Litha, "Nelayan Teluk Palu Berupaya Pulihkan Terumbu Karang yang Rusak Akibat Tsunami," *VoaIndonesia*. [Online]. Available: <https://www.voaindonesia.com/a/nelayan-teluk-palu-berupaya-pulihkan-terumbu-karang-yang-rusak-akibat-tsunami-5009995.html>
- [5] M. Sujai, "Analisis Aspek Pembiayaan Untuk Mendukung Sektor Kemaritiman yang Berwawasan Lingkungan di Indonesia," *J. Bumi Lestari*, pp. 41–49, 2018, doi: <https://doi.org/10.24843/blje.2018.v18.i02.p01>.
- [6] A. Susanti, S. Riadi, and D. Sari, "Analisis Rasio Keserasian Belanja Pada Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan," *J. Ilmu Manaj. Saburai*, vol. 8, no. 1, pp. 11–18, 2022, doi: <https://doi.org/10.24967/jmb.v8i1.1600>.
- [7] A. Widayanto, "PERAN ANGGARAN SEBAGAI ALAT PENGAWASAN BIAYA OPERASIONAL PT PELAYARAN NASIONAL SAMUDERA RAYA JAKARTA," *J. Ilm. Manajemen, Ekon. dan Akunt.*, vol. 2, no. 1, pp. 1–10, 2022, doi: <https://doi.org/10.55606/jurimea.v2i1.107>.
- [8] W. Djafar, "Fiscal Policy to Encourage Investment in the Marine Logistics Sector," *Collab. Eng. Dly. B. Ser.*, vol. 2, no. 1, pp. 42–47, 2024, doi: <https://doi.org/10.62012/collaborate.v2i1.59>.
- [9] C. В. Онешко, "The influence of accounting on the efficiency Of assets management of sea transport enterprises," *Розвиток методів управління та господарювання на транспорті*, vol. 2, no. 87, pp. 7–22, 2024, doi: <https://doi.org/10.31375/2226-1915-2024-2-07-22>.
- [10] E. Kusmiati, M. D. Ungkari, and A. A. Basit, "Planning, Implementation, and Control of Management Accounting in the Public Sector," in *2nd International Seminar on Business, Economics, Social Science and Technology (ISBEST 2019)*, Atlantis Press, 2020, pp. 208–213. doi:



DOI: 10.52362/jisamar.v9i3.1992

Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

<https://doi.org/10.2991/AEBMR.K.200522.041>.

- [11] K. Timoshenko, C. Kuruppu, I. Badshah, and D. Ambalangodage, "A Systems Approach to Comprehend Public Sector (Government) Accounting," in *Integrated Science in Digital Age: ICIS 2019*, Springer, 2020, pp. 50–59. doi: [https://doi.org/10.1007/978-3-030-22493-6\\_6](https://doi.org/10.1007/978-3-030-22493-6_6).
- [12] Mahmudi, *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah*. 2019.
- [13] Kementerian Kelautan dan Perikanan, "Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 40/Permen-Kp/2014 Tentang Peran Serta Dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil," *Peratur. Menteri Kelaut. Dan Perikan. Republik Indones. Nomor 40/Permen-Kp/2014*, vol. 2014, 2014.



DOI: 10.52362/jisamar.v9i3.1992

Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).